

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi Retribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas Perdagangan dan pasar, selama 5 tahun terakhir penerimaan retribusi pasar selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih berada di bawah Retribusi penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang; dan (ii) di Kabupaten Lampung Tengah belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang Retribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh

kebijakan–kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang

serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar dan besarnya retribusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Setiap daerah berkewajiban menyukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari PAD. Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala sumber dana yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing. PAD inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah. Dalam struktur PAD, secara umum pajak daerah merupakan komponen terbesar.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah di pacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin di pungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing– masing daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Untuk melihat target dan realisasi perubahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2005-2009 dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2005-2009 (Dalam Rupiah).

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2005	8.014.254.337,14	8.408.483.577,27	104,91
2006	11.110.564.232,23	10.928.085.486,06	98,35
2007	12.680.987.456,12	12.255.761.012,00	96,64
2008	15.055.245.632,68	15.387.349.798,65	102,20
2009	17.567.873.654,56	17.938.501.956,98	102,10
Rata-Rata			100,84

Sumber : DPPKD Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Dari Tabel 1 dapat di lihat pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami fluktuasi, target ini dapat di lihat pada tahun 2005 yang melampaui target yang mencapai 104,91%. Namun pada tahun 2006 dan 2007 pencapaian hanya sebesar 98,35% dan 96,64%. Mulai pada tahun 2008 dan 2009 Pemerintah Daerah Lampung Tengah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini terlihat dari naiknya target yang sebesar Rp 15.055.245.632,68 pada tahun 2005 dan Rp 17.567.873.654,56 pada tahun 2006 dan realisasi pada tahun 2008 mencapai 102.20% dan pada tahun 2009 mencapai 102,10%. Sedangkan persentase pencapain rata-rata dalam kurun waktu 2005-2009 sebesar 100,84%.

Salah satu usaha peningkatan Pendapatan Asli daerah tersebut dapat di lakukan dengan melakukan optimalisasi retibusi daerah. Adapun guna melihat realisasi penerimaan rertibusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Target Retribusi dan Realisasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2005 – 2009 (dalam rupiah).

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2005	3.021.718.000,0 0	2.902.201.176,5 0	97,02
2006	3.788.218.000,0 0	3.834.441.135,0 0	101,22
2007	4.851.861.820,0 0	4.424.257.045,0 0	91,18
2008	5.192.651.540,0 0	4.765.506.358,8 0	91,77
2009	6.083.318.650,0 0	5.022.538.595,0 0	82,56
Rata-Rata			92,75

Sumber : DPPKD Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Dari Tabel 2 dapat di lihat pencapaian retribusi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami fluktuasi, pencapaian yang melampaui target terbesar dari realisasi retribusi daerah terjadi pada tahun anggaran 2006 sebesar 101,22% yaitu sebesar Rp 3.834.441.135,00.

Sedangkan penurunan terbesar dari realisasi retribusi terjadi pada tahun anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 5.022.538.595,00 atau hanya mencapai target sebesar 82,56%, sedangkan rata-rata pencapaian retribusi pada tahun 2005-2009 mencapai 92,75%.

Berdasarkan uraian di atas kajian tentang retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi Retribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas perdagangan dan pasar Kabupaten Lampung Tengah, selama 5 tahun terakhir penerimaan retribusi pasar selalu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2005 dan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih berada di bawah Retribusi penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan

kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang; dan (ii) di Kabupaten Lampung Tengah yang baru berumur 5 tahun ini belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang Retribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara dari berbagai retribusi daerah yang ada, salah satu yang Retribusial untuk di tingkatkan perolehannya adalah dari penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lampung Tengah karena di Lampung Tengah banyak pasar yang belum tergali Retribusinya.

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kabupaten Lampung Tengah dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2005	274.805.938	8.519.594.688	3,23
2006	244.379.656	10.928.095.496	2,24
2007	463.253.156	12.265.861.013	3,78
2008	715.208.125	15.387.349.798	4,65
2009	725.484.325	18.938.501.956	3,83
Rata-Rata			3,55

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Tabel 3 menunjukkan persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD cenderung menurun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,65 %, sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,24 %. Sedangkan rata-rata pertahun retribusi pasar terhadap

PAD sebesar 3,55 %. Kontribusi yang menurun setiap tahunnya di karenakan tidak tercapainya target retribusi yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2005	274.805.938	2.902.201.176,50	9,47
2006	244.379.656	3.834.441.135,00	6,37
2007	463.253.156	4.424.257.045,00	10,47
2008	715.208.125	4.765.506.358,80	15,00
2009	725.484.325	5.022.538.595,00	14,44
Rata-Rata			11,15

Sumber : DPPKD Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Tabel 4 memperlihatkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, terlihat bahwa secara nominal retribusi pasar tidak bisa memberikan penerimaan yang sangat memuaskan terhadap retribusi daerah, ini dapat di lihat dengan rata-rata setiap tahunnya yang hanya sebesar 11,15 %.

Tabel 5 Realisasi Pertumbuhan Retribusi Pasar, PAD dan Retribusi Daerah.

Tahun	Retribusi pasar	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	Retribusi Daerah	Pertumbuhan
2005	274.805.938	-	8.519.594.688,38	-	2.902.201.176,50	-
2006	244.379.656	-91,11	10.928.095.496,07	28,27	3.834.441.135,00	32,12
2007	463.253.156	89,56	12.265.861.013,00	12,24	4.424.257.045,00	15,38
2008	715.208.125	54,39	15.387.349.798,65	25,44	4.765.506.358,80	7,71
2009	725.484.325	1,44	18.938.501.956,98	23,07	5.022.538.595,00	5,39
Rata2	484.627.040	13,57	13206080590,20	17,80	4189788891,80	12,12

Sumber : DPPKD Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Tabel 5 memperlihatkan realisasi pertumbuhan retribusi pasar, PAD dan retribusi daerah. Pertumbuhan retribusi pasar memperlihatkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan rata-rata mencapai 13,57 % per tahun. Pertumbuhan PAD juga

mengalami penurunan yaitu dengan rata-rata sebesar 17,80 % pertahun, sedangkan pertumbuhan retribusi daerah mencapai yaitu dengan rata-rata 12,12 % pertahun.

Untuk mengetahui target yang ditetapkan dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Target Retribusi Pasar (Rp.)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp.)	Persentase Tingkat Realisasi
2005	556.848.432	274.805.938	49,35
2006	556.830.240	244.379.656	43,89
2007	638.383.160	463.253.156	72,57
2008	629.123.160	715.208.125	113,68
2009	700.462.500	725.488.325	103,57
Rata-Rata			76,61

Sumber : DPPKD Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Persentase tingkat realisasi retribusi pasar Kabupaten Lampung Tengah berfluktuasi. Persentase realisasi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 113,68 % dan persentase terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 43,89 %. Secara keseluruhan rata-rata tingkat persentase realisasi sebesar 79,61 % setiap tahunnya.

B. Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten diprovinsi lampung yang sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka otonomi daerah. Sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan maka, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan Retribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang

masalah diatas maka yang menjadi permasalahan adalah : Seberapa besar tingkat efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan penerimaan yang diberikan dari retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Lampung Tengah ?.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan yang diberikan dari retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan yang diberikan dari retribusi pasar terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Lampung Tengah

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional dimana pembangunan daerah turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah melakukan kebijakan yaitu, setiap daerah diberi wewenang untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain selain bantuan dari Pemerintah Pusat, misalnya pajak-pajak daerah sesuai dengan Retribusi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Penerimaan Daerah merupakan landasan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan Otonomi di daerah salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi penerimaan yang

digali di daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari perusahaan milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupaun produk yang di hasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Memang dengan retribusi ini berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat di abaikan perannya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan dari sektor retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling penting dalam mengisi kas Negara guna membiayai kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Retribusi sebagaimana halnya dengan pajak, mempunyai fungsi sebagai pengisi kas (budgeter) dan sebagai pengatur (regular). Seperti telah di jelaskan sebelumnya bahwa retribusi banyak jenisnya, alasan ini yang memungkinkan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang Retribusial dalam peningkatan pendapatan daerah. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa yang telah di berikan.

Pengertian tersebut sesuai dengan definisi retribusi yang terdapat dalam PP.No : 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yaitu : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi menganut azas manfaat (benefit principles), yang maksudnya ialah besarnya retribusi di tentukan berdasarkan manfaat yang di

terima oleh pengguna jasa. Untuk mengatasi masalah dalam menentukan besarnya manfaat, maka menurut M.Suparmoko (2002 : 85-86), perlu di lakukan langkah berikut : pertama, identifikasi manfaat fisik yang dapat di ukur besarnya, kemudian di tetapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti atau survey tentang kesediaan membayar .

Retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang di kontrakan, yang di sediakan atau di selenggarakan oleh pemreintah daerah, tidak termasuk yang di kelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta. Jadi retribusi, pasar grosir dan pertokoan merupakan biaya yang harus di bayarkan oleh pengguna fasilitas pasar/pertokoan yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar grosir dan pertokoan ini berperan penting dalam pendapatan daerah dan berRetribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi khususnya perdagangan yang menuntut tersedianya fasilitas /tempat-tempat berdagang. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, di harapkan penyediaan jasa balik dari pemerintah terhadap pemakai jasa pelayanan publik dalam hal ini penyewa bangunan tempat berdagang milik pemerintah meningkat pula.

Adapun jasa balik tersebut adalah :

1. Secara tidak Langsung
 - a. Sarana jalan sekitar pasar tempat mereka berdagang
 - b. Fasilitas-fasilitas umum yang telah di sediakan oleh Pemda setempat.
2. Secara Langsung
 - a. Lahan yang telah di sediakan Pemda sebagai pasar tempat berdagang

- b. Pelayanan yang meliputi pengaturan tempat dan penataan, pembinaan – pembinaan tentang peraturan dan permodalan, kenyamanan berdagang di pasar

Salah satu subsektor yang memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lampung Tengah adalah retribusi pasar. Penerimaan subsektor ini termasuk dalam pos retribusi daerah, yang pengelolaannya dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah.

Retribusi adalah kekuatan atau kemampuan yang di miliki, dalam penelitian ini Retribusi retribusi pasar sebagai kekuatan atau kemampuan yang di miliki suatu daerah yang belum teralisasi. Oleh karenanya di butuhkan berbagai upaya dalam pelaksanaan dan manajemen pemungutan retribusi yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam memungut retribusi, sehingga retribusi tersebut dapat di jadikan aset yang nyata.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul penerimaan retribusi pasar kabupaten lampung tengah dengan melihat indikator – indikator Retribusi penerimaan retribusi serta belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan Retribusi penerimaan retribusi pasar khususnya kabupaten Lampung Tengah sebagai objek penelitian.

Penulis memberi batasan dalam pembahasan Retribusi penerimaan kabupaten Lampung Tengah dengan mengkhususkan pembahasan pada retribusi pasar.